



Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah, Kompetensi SDM, dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salehoddin

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Madura, Pamekasan

Abstrak

Penelitian ini berada dalam ranah akuntansi sektor publik yang menitikberatkan pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 150 aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Inspektorat Daerah, serta staf keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sampel ditentukan secara purposive dengan kriteria keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam penggunaan SIKD. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan tahapan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji signifikansi melalui uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik secara parsial maupun simultan. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan tata kelola keuangan daerah, serta menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan publik. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya integrasi sistem, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan efektivitas pengawasan sebagai faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan.

Informasi Artikel

Kata Kunci :

Akuntansi sektor publik, Kompetensi sumber daya manusia, Kualitas laporan keuangan, Pengawasan internal, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)



Abstract

This study falls within the domain of public sector accounting, emphasizing transparency and accountability in the management of local government finances. The objective of this research is to analyze the influence of the implementation of the Regional Financial Information System (SIKD), human resource (HR) competencies, and internal supervision on the quality of local government financial reports in East Java Province. A quantitative approach was employed using a survey method, with questionnaires distributed to 150 civil servants (ASN) working in the Regional Financial Management Agency (BPKD), the Regional Inspectorate, and financial staff in Regional Apparatus Organizations (OPD). The sample was determined purposively based on criteria such as direct involvement in financial management and reporting and at least one year of experience using SIKD. Data were analyzed using multiple linear regression, including validity and reliability testing, classical assumption tests, and significance testing through t-tests and F-tests. The results indicate that the implementation of SIKD, HR competencies, and internal supervision have a positive and significant effect on the quality of local government financial reports, both partially and simultaneously. These findings contribute significantly to the strengthening of local financial governance and provide a basis for policymakers to improve the quality of public financial reporting. The conclusion of this study highlights the importance of system integration, capacity building of human resources, and effective internal supervision as key determinants of accountable and transparent local government financial reporting..

Keywords :
Financial report quality, Human resource competence, Internal supervision, Regional Financial Information System (SIKD), Public sector accounting

***Corresponding Author:** ¹ Salehoddin
, solehoddin.unira@gmail.com

Academic Editor:
Wardatus Syarifah

Received: 26-06-2025

Revised: 27-06-2025

Accepted: 28-06-2025

Published: 30-06-2025

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan sektor publik terus mengalami transformasi seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu aspek krusial dalam sistem pemerintahan daerah adalah penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang baik tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, namun juga sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis, pengawasan publik, dan evaluasi kinerja fiskal (Roberto et al., 2025). Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, kualitas laporan keuangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti

rendahnya kompetensi sumber daya manusia, lemahnya pengawasan internal, dan belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis teknologi.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sebagai instrumen digitalisasi manajemen keuangan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pelaporan. Namun, implementasinya di berbagai daerah belum menunjukkan hasil yang merata. Studi awal melalui observasi pada 10 pemerintah daerah di Jawa Timur menunjukkan bahwa 4 daerah masih menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI tahun 2023, dengan temuan utama berupa ketidaktepatan pencatatan aset, serta lemahnya pengendalian intern dan kapasitas SDM di bidang akuntansi pemerintahan. Hasil angket awal terhadap 45 ASN pengelola keuangan menunjukkan bahwa 62% menyatakan masih mengalami kesulitan dalam pengoperasian modul-modul SIKD secara mandiri tanpa bantuan pihak ketiga.

Kajian literatur sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi keuangan secara signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan jika didukung oleh kompetensi SDM dan pengawasan yang memadai (Pham et al., 2022, Rahmani et al., 2023, Nguyen et al., 2021). Akan tetapi, sebagian studi lain justru menemukan bahwa sistem informasi hanya berperan sebagai alat bantu teknis dan tidak berpengaruh signifikan apabila tidak didukung oleh budaya kerja dan tata kelola yang baik (Mora et al., 2023). Penelitian oleh Zhuang & Duan (2025), di sektor publik Tiongkok menekankan bahwa efektivitas sistem keuangan sangat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi individu dalam mengelola sistem dan kepatuhan terhadap pengawasan internal. Dengan demikian, terdapat perbedaan hasil (research gap) yang belum banyak dikaji secara simultan dalam satu model integratif di konteks pemerintahan daerah Indonesia, khususnya di Jawa Timur.

Permasalahan ini diperkuat oleh data wawancara awal peneliti dengan kepala bidang akuntansi di salah satu BPKD kabupaten di Jawa Timur, yang menyatakan bahwa "meskipun sistem SIKD sudah digunakan sejak 2019, penginputan data keuangan masih sering tertunda akibat rotasi pegawai yang belum dibekali pelatihan teknis." Hal ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi SIKD tidak hanya bersifat teknologis, namun juga struktural dan kompetensial. Oleh karena itu, perlu penelitian empiris yang menguji secara langsung pengaruh implementasi SIKD,

kompetensi SDM, dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Secara teoretis, penelitian ini merujuk pada teori Good Governance dan Technology Acceptance Model (TAM), yang menjelaskan bahwa keberhasilan sistem informasi publik sangat bergantung pada faktor manusia dan struktur pengawasan yang melekat (Davis, 1986). Dengan mengintegrasikan ketiga variabel utama tersebut dalam satu kerangka konseptual, penelitian ini berupaya menutup kesenjangan akademik sekaligus menjawab kebutuhan praktis dalam peningkatan tata kelola keuangan daerah berbasis data.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kompetensi SDM, dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola keuangan daerah, serta menjadi rujukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pelatihan, pengawasan, dan penguatan sistem informasi keuangan.

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teoritis tersebut, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Implementasi SIKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H2: Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H3: Pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- H4: Implementasi SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN

Penelitian ini berangkat dari kompleksitas pengelolaan keuangan sektor publik yang membutuhkan integrasi antara teknologi, sumber daya manusia, dan sistem pengawasan. Ketiga elemen tersebut menjadi prasyarat untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dalam konteks pemerintah daerah. Untuk menjelaskan

keterkaitan antara variabel-variabel tersebut, digunakan pendekatan teoritis yang terdiri dari teori umum (*grand theory*), teori menengah (*middle theory*), dan teori terapan (*applied theory*) yang saling memperkuat satu sama lain.

1. Grand Theory: Good Governance Theory

Teori Good Governance menjadi kerangka dasar dalam memahami bagaimana akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dapat tercapai melalui tata kelola sektor publik yang efektif. Prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan menuntut penyajian informasi keuangan yang tepat waktu dan dapat dipercaya. Yamen & and Can (2023), menegaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan pemerintah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja tata kelola suatu entitas publik. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan yang baik menunjukkan adanya komitmen terhadap transparansi dan pertanggungjawaban publik (Tran et al., 2021).

2. Middle Theory: Technology Acceptance Model (TAM)

Untuk menjelaskan pengaruh implementasi SIKD terhadap kualitas laporan keuangan, penelitian ini mengacu pada Technology Acceptance Model (Davis, 1986), yang menyatakan bahwa penerimaan pengguna terhadap sistem informasi dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*). Studi terbaru oleh Pauluzzo et al., (2024), menunjukkan bahwa efektivitas sistem informasi keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat adopsi pengguna dan dukungan kelembagaan yang memadai. Ketika SIKD diimplementasikan secara konsisten dan didukung dengan pelatihan yang memadai, maka akan meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. Applied Theory: Resource-Based View (RBV)

Dalam melihat peran kompetensi SDM dan pengawasan internal, digunakan teori Resource-Based View yang menekankan bahwa keunggulan institusi publik terletak pada sumber daya internal, termasuk kemampuan SDM dan struktur pengawasan (Barney, 1991). SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi, teknologi informasi, dan pengelolaan keuangan publik berperan krusial dalam menyusun laporan yang andal (Klaus et al., 2025). Selain itu, sistem pengawasan internal yang efektif dapat meminimalkan risiko kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan, seperti yang ditegaskan oleh Maulidiyah & Harto, (2025).

4. Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam era digitalisasi tata kelola pemerintahan, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) hadir sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. SIKD dirancang untuk memfasilitasi pelaporan yang terintegrasi dan real time, mengurangi potensi manipulasi data, serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan secara konsisten antar entitas pemerintah daerah.

Implementasi SIKD mencerminkan adopsi teknologi informasi dalam proses akuntansi sektor publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi keuangan, baik dari aspek relevansi, keandalan, maupun ketepatan waktu. Dalam konteks ini, Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1986), menjadi dasar teoritis yang menjelaskan bahwa persepsi kemudahan dan manfaat sistem akan memengaruhi keberhasilan penggunaannya dalam organisasi. Ketika sistem diterapkan secara optimal, maka proses pencatatan, pelaporan, dan penyajian informasi keuangan menjadi lebih akurat dan efisien.

Studi oleh Bekiaris et al., (2025), menunjukkan bahwa digitalisasi sistem informasi keuangan di sektor publik berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah lokal. Begitu pula temuan Matheus et al., (2023), menegaskan bahwa keberadaan sistem informasi berbasis teknologi memperkuat kapasitas organisasi publik dalam menyampaikan informasi keuangan yang dapat diakses oleh stakeholder secara terbuka dan tepat waktu. Di Indonesia, Virginia Deskarani & Vivi Oktari (2024), membuktikan bahwa implementasi SIKD berpengaruh signifikan terhadap opini WTP yang diterima pemerintah daerah karena meningkatkan kesesuaian antara pelaporan dan regulasi akuntansi pemerintah.

Namun demikian, keberhasilan SIKD tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologinya, tetapi juga oleh penguasaan teknis, infrastruktur pendukung, serta dukungan manajerial. Jika implementasi SIKD tidak dibarengi dengan pelatihan intensif, manajemen perubahan yang efektif, dan integrasi dengan sistem pengawasan internal, maka sistem informasi keuangan hanya akan menjadi formalitas administratif yang tidak berdampak pada peningkatan kualitas laporan.

Data observasi awal di beberapa pemerintah daerah Jawa Timur menunjukkan bahwa daerah yang telah mengimplementasikan SIKD secara konsisten sejak 2020 mengalami peningkatan opini audit dari WDP menjadi WTP dalam dua tahun terakhir. Hal ini memperkuat dugaan bahwa penerapan sistem informasi yang baik berperan sebagai enabler penting dalam pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris, terdapat bukti kuat bahwa implementasi SIKD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Integrasi teknologi ke dalam siklus keuangan publik menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang tidak hanya menyederhanakan proses administratif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah. Berdasarkan narasi diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H1: Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh sistem informasi dan mekanisme pengawasan, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dan menyusun laporan tersebut. Dalam konteks organisasi sektor publik, kompetensi SDM mengacu pada kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional pegawai dalam menjalankan fungsi-fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Menurut Resource-Based View (RBV) yang dikembangkan oleh Barney, (1991), kemampuan organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif – termasuk dalam hal tata kelola keuangan – ditentukan oleh keunggulan sumber daya internal, termasuk sumber daya manusia yang memiliki kompetensi unik, langka, dan sulit ditiru. Dalam sektor publik, kompetensi SDM menjadi faktor strategis dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Studi Mbae et al., (2025), menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan publik sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi SDM, terutama dalam menghadapi tantangan sistem informasi keuangan berbasis teknologi. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa tanpa dukungan pegawai yang

kompeten, keberadaan sistem seperti SIKD hanya akan menjadi alat formalitas yang tidak berdampak pada peningkatan kualitas laporan.

Sejalan dengan itu, Suttipun et al., (2018), dalam studi empiris terhadap pemerintah lokal di Asia Tenggara menyimpulkan bahwa pegawai yang memiliki sertifikasi akuntansi sektor publik, pengalaman kerja minimal lima tahun, serta kemampuan analisis regulasi keuangan, lebih mampu menyusun laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai standar. Kualitas laporan keuangan pemerintah akan sangat terpengaruh oleh kecakapan teknis SDM dalam pencatatan, klasifikasi transaksi, serta penyajian informasi secara transparan dan dapat diaudit.

Di Indonesia, Usman et al., (2023), menyatakan bahwa salah satu penyebab masih adanya daerah yang belum meraih opini WTP dari BPK adalah kurangnya pelatihan intensif dan rotasi pegawai yang mengakibatkan ketidakterpaduan pengetahuan dalam siklus laporan keuangan. Hasil observasi awal peneliti juga menunjukkan bahwa 58% ASN yang menangani pelaporan keuangan di beberapa OPD di Jawa Timur belum mengikuti pelatihan akuntansi berbasis SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) selama dua tahun terakhir. Hal ini menjadi sinyal bahwa peningkatan kompetensi SDM merupakan prioritas dalam reformasi keuangan daerah.

Dengan demikian, secara teoritis dan empiris, terdapat dukungan kuat bahwa kompetensi SDM berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pegawai yang kompeten akan mampu memanfaatkan sistem informasi secara optimal, mengikuti peraturan keuangan dengan tepat, dan menyusun laporan keuangan yang akuntabel, transparan, serta andal bagi para pemangku kepentingan. Berdasarkan narasi diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu: H2: Kompetensi sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal memegang peran kunci dalam memastikan seluruh proses pelaporan keuangan dilakukan secara tertib, taat azas, transparan, dan akuntabel. Sistem pengawasan internal bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan, kecurangan, serta penyimpangan dalam

penggunaan dan pelaporan anggaran, sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah.

Secara teoritis, peran pengawasan internal dapat dijelaskan melalui Agency Theory, yang menekankan pentingnya mekanisme kontrol dalam relasi antara prinsipal (masyarakat atau DPRD) dan agen (pemerintah daerah). Dalam hubungan ini, pengawasan internal bertindak sebagai sistem pengendalian manajerial yang menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan kepentingan publik dan ketentuan yang berlaku. Ketika pengawasan internal berjalan efektif, maka risiko manipulasi data keuangan, kesalahan pencatatan, atau penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisasi secara signifikan.

Berdasarkan hasil studi Novatiani et al., (2024), ditemukan bahwa kualitas laporan keuangan daerah meningkat secara signifikan seiring penguatan struktur pengawasan internal, terutama dalam hal audit internal, prosedur verifikasi, dan fungsi pengendalian manajemen. Studi tersebut menekankan bahwa pengawasan internal yang lemah berpotensi menciptakan laporan keuangan yang tidak andal, tidak relevan, dan penuh bias administratif.

Penelitian Afiah & Azwari (2015), juga menegaskan pentingnya desain sistem pengendalian internal yang berbasis risiko (risk-based internal control), di mana kegiatan pengawasan terfokus pada area yang memiliki risiko tertinggi dalam penyajian laporan keuangan. Di negara berkembang, lemahnya fungsi pengawasan sering kali disebabkan oleh kurangnya integrasi sistem, keterbatasan kapasitas auditor internal, serta ketidaktegasan tindak lanjut temuan audit. Hal ini berdampak pada rendahnya opini audit yang diterima daerah serta lemahnya kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah.

Sementara itu, Tarjo et al., (2022), dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia menyatakan bahwa pengawasan internal tidak hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai alat evaluatif dan pembinaan terhadap OPD agar tetap dalam koridor akuntabilitas. Keberadaan Inspektorat sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) memiliki peran strategis untuk mengaudit proses keuangan secara preventif, mendeteksi kelemahan sistemik, dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Hasil observasi awal dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa 40% responden dari Inspektorat Daerah di beberapa kabupaten di Jawa Timur menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya auditor dan ketidakterpaduan sistem pengawasan internal menyebabkan proses pelaporan keuangan tidak optimal. Namun, di daerah yang telah menerapkan sistem pengawasan berbasis aplikasi dan melakukan audit secara triwulanan, terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan secara signifikan, baik dari sisi ketepatan waktu maupun ketaatan terhadap regulasi.

Dengan demikian, terdapat bukti konseptual dan empiris yang kuat bahwa pengawasan internal yang efektif dan terstruktur dapat memperkuat integritas, akurasi, dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Fungsi pengawasan yang aktif dan responsif menjadi elemen pengontrol yang tidak dapat dipisahkan dalam tata kelola keuangan daerah yang berkualitas. Berdasarkan narasi di atas maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H3: Pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Simultan Implementasi SIKD, Kompetensi SDM, dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dilihat sebagai hasil dari satu faktor tunggal, melainkan merupakan output dari interaksi berbagai elemen organisasi, sistem, dan manusia secara terintegrasi. Dalam konteks ini, tiga elemen strategis yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi adalah: (1) implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), (2) kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan (3) efektivitas pengawasan internal. Ketiganya merupakan pilar utama dalam tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berkualitas.

Menurut perspektif systems theory, organisasi publik merupakan sistem terbuka yang keberhasilan prosesnya dipengaruhi oleh koordinasi antar subsistem. Dalam hal ini, SIKD sebagai sistem informasi, SDM sebagai pelaksana, dan pengawasan internal sebagai mekanisme kontrol, secara simultan membentuk ekosistem pelaporan keuangan yang sehat. Ketika ketiganya berjalan secara harmonis, maka proses penyusunan laporan keuangan tidak hanya menjadi formalitas administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip good governance yang sesungguhnya (Roztocki et al., 2025).

Penelitian oleh Wang et al., (2024), menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan pemerintah tidak akan berdampak signifikan terhadap transparansi pelaporan apabila tidak dibarengi dengan dukungan kompetensi teknis pegawai dan mekanisme kontrol internal yang kuat. Hal ini didukung oleh Mankevich et al., (2023), yang menekankan bahwa peran SDM sebagai human enabler sangat penting dalam menjembatani penggunaan teknologi informasi dan pelaksanaan pengawasan secara efektif di sektor publik.

Studi empiris oleh Kombat et al., (2025), menunjukkan bahwa ketika sistem pelaporan digital (seperti SIKD) digunakan secara aktif oleh pegawai yang kompeten dan diawasi oleh sistem pengendalian internal yang kuat, maka kualitas laporan keuangan meningkat secara signifikan, baik dari sisi akurasi, kepatuhan terhadap standar akuntansi, maupun persepsi stakeholder terhadap integritas laporan tersebut.

Hasil uji simultan dalam penelitian ini memperkuat bukti tersebut, di mana ketiga variabel independen – implementasi SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal – secara bersama-sama memengaruhi kualitas laporan keuangan. Ketiganya memiliki kontribusi positif dan saling mendukung, menciptakan sistem pelaporan yang tidak hanya efisien, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara publik.

Implikasi teoritis dari temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif dalam manajemen keuangan publik lebih relevan dibanding pendekatan parsial. Dari sisi praktis, hasil ini menegaskan perlunya sinergi lintas fungsi antara penyedia sistem (SIKD), pembinaan kompetensi ASN, dan penguatan pengawasan berbasis risiko di lingkungan pemerintah daerah. Berdasarkan narasi diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H4: Implementasi SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas yang terdiri dari implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan internal terhadap variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menjelaskan

hubungan antarvariabel melalui data numerik dan teknik analisis statistik yang memungkinkan pengujian hipotesis secara objektif (Hair, 2014).

Identifikasi Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan empat variabel utama, yaitu:

1. Variabel dependen (Y): Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Variabel independen (X1): Implementasi SIKD
3. Variabel independen (X2): Kompetensi SDM
4. Variabel independen (X3): Pengawasan internal

Setiap variabel diukur melalui indikator-indikator spesifik yang disusun berdasarkan kajian literatur dan penelitian sebelumnya, menggunakan skala Likert 1-5. Skala ini memungkinkan responden menyatakan tingkat persetujuan terhadap setiap pernyataan dengan rentang yang cukup untuk mendeteksi variasi pendapat secara kuantitatif (Zainurrafiqi et al., 2020), (Gazali, 2023b), (Gazali, 2023a), (Zainurrafiqi et al., 2024), (Zainurrafiqi & Rachmawati, 2019).

Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan, termasuk yang berada di:

1. Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)
2. Inspektorat Daerah
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait keuangan

Lokasi penelitian difokuskan pada sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang telah menerapkan SIKD secara aktif. Jumlah sampel sebanyak 150 responden dipilih menggunakan teknik purposive **sampling** berdasarkan kriteria: (1) memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam penggunaan SIKD, dan (2) terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang disusun oleh peneliti dan telah diuji melalui tahap validasi isi oleh para ahli di bidang keuangan publik dan uji coba empirik pada 30 responden untuk menguji reliabilitasnya. Analisis reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach's Alpha, dengan nilai di atas 0,70 yang menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang memadai (Hair, 2014).

Indikator untuk setiap variabel dirancang dengan memperhatikan relevansi teoritis dan kesesuaian praktis dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia. Misalnya, indikator SIKD meliputi kemudahan penggunaan, keandalan sistem, dan integrasi data; kompetensi SDM mencakup keahlian teknis, pemahaman regulasi, dan pengalaman; sedangkan pengawasan internal dievaluasi dari sisi sistem pengendalian, audit internal, dan tindak lanjut temuan.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis dilakukan dengan perangkat lunak SPSS versi 26. Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Di mana:

Y adalah kualitas laporan keuangan,

X₁ adalah implementasi SIKD,

X₂ adalah kompetensi SDM,

X₃ adalah pengawasan internal.

Uji statistik yang digunakan meliputi:

1. Uji t untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial.
2. Uji F untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Koefisien Determinasi (R²) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variasi X terhadap Y.

Pendekatan ini dirancang agar dapat direplikasi oleh peneliti lain dalam konteks serupa, serta memberikan pemahaman metodologis yang terukur dan transparan dalam menilai hubungan antar variabel.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan

pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian disajikan dalam beberapa bagian utama: statistik deskriptif, hasil uji asumsi, dan uji hipotesis, yang kemudian dianalisis secara kritis.

1. Statistik Deskriptif

Tabel berikut menunjukkan statistik deskriptif untuk setiap variabel penelitian, yaitu implementasi SIKD, kompetensi SDM, pengawasan internal, dan kualitas laporan keuangan. Rata-rata dan standar deviasi untuk setiap variabel menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan di antara responden, yang terdiri dari ASN yang bekerja di BPKD, Inspektorat Daerah, dan OPD terkait keuangan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Rata-rata (M)	Standar Deviasi (SD)
Implementasi SIKD	3.65	0.89
Kompetensi SDM	3.42	0.77
Pengawasan Internal	3.75	0.93
Kualitas Laporan Keuangan	3.85	0.71

Sumber: data diolah (2025)

2. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 2. Regresi Linier Berganda

Variabel	t-Value	p-Value	F-Value	R ²
Implementasi SIKD	4.25	0.01		
Kompetensi SDM	3.12	0.01		
Pengawasan Internal	3.88	0.01		
Model Simultan			35.67	0.68

Sumber: data diolah (2025)

Uji hipotesis dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial dan simultan. Berikut adalah hasil uji t dan uji F:

a. Uji Parsial (Uji t)

1. Implementasi SIKD: Hasil uji t menunjukkan bahwa implementasi SIKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ($t =$

4.25, $p < 0.01$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi SIKD, semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Kompetensi SDM: Hasil uji t menunjukkan bahwa kompetensi SDM juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ($t = 3.12, p < 0.01$). Ini mengindikasikan bahwa pegawai dengan kompetensi yang lebih tinggi dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan.
3. Pengawasan Internal: Hasil uji t menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ($t = 3.88, p < 0.01$). Hal ini berarti bahwa pengawasan internal yang efektif dapat meningkatkan akurasi dan keandalan laporan keuangan.

b. Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji F menunjukkan bahwa implementasi SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ($F = 35.67, p < 0.01$). Ini menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berkontribusi secara bersama-sama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 0.68, yang menunjukkan bahwa 68% variasi dalam kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu implementasi SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal. Ini mengindikasikan bahwa model yang digunakan cukup baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa ketiga variabel—SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal—berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini memberikan wawasan

penting bagi penguatan tata kelola keuangan daerah, dan dapat menjadi acuan untuk pengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan publik.

1. Pengaruh Implementasi SIKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SIKD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi terbukti meningkatkan efisiensi pelaporan keuangan serta memperkecil potensi kesalahan dalam pencatatan. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nakpodia et al., (2024), yang menemukan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik di Portugal berdampak positif pada kualitas laporan keuangan, dengan meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu pelaporan. Penelitian ini juga mendukung temuan Tejed-Romero & Ferraz Esteves Araujo (2025), yang menekankan bahwa sistem informasi yang efektif dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam sektor publik.

Namun, implementasi SIKD tidak lepas dari tantangan. Meskipun sistem ini diharapkan meningkatkan transparansi, beberapa daerah di Jawa Timur masih mengalami kesulitan dalam penggunaan SIKD secara mandiri, seperti yang dilaporkan oleh responden dalam penelitian ini. Sebagian besar ASN mengaku kesulitan mengoperasikan modul-modul SIKD tanpa bantuan eksternal. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya pelatihan yang memadai untuk memastikan keberhasilan implementasi teknologi. Keberhasilan implementasi SIKD sangat bergantung pada tingkat adopsi pengguna dan kapasitas teknis yang dimiliki oleh SDM di setiap daerah.

2. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi SDM juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Keterampilan teknis, pengetahuan akuntansi, dan pemahaman terhadap regulasi akuntansi pemerintah sangat penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar. Penelitian ini mendukung teori Resource-Based View (RBV) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM merupakan sumber daya internal yang krusial dalam mencapai keunggulan dalam pengelolaan keuangan publik (Barney, 1991).

Sejalan dengan itu, studi oleh Camisón-Haba et al., (2024), mengonfirmasi bahwa kompetensi SDM yang memadai memungkinkan pegawai untuk

memanfaatkan sistem informasi secara optimal, mengikuti peraturan dengan tepat, dan menghasilkan laporan yang lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ngoc Hung et al., (2023) juga mengungkapkan bahwa salah satu faktor penghambat utama dalam meraih opini WTP adalah rendahnya kompetensi SDM dalam mengelola laporan keuangan. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa investasi dalam pengembangan kapasitas SDM di bidang akuntansi pemerintahan merupakan langkah penting dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun, meskipun kompetensi SDM berpengaruh signifikan, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kekurangan dalam pelatihan dan rotasi pegawai yang kurang terintegrasi, yang menyebabkan rendahnya efektivitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Hasil ini mencerminkan temuan sebelumnya oleh Karatzimas et al., (2025), yang menunjukkan bahwa pengelolaan laporan keuangan yang baik memerlukan SDM dengan pengalaman dan pelatihan yang memadai di bidang akuntansi dan regulasi keuangan pemerintah.

3. Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengawasan internal merupakan faktor penting lainnya yang berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengawasan yang efektif dapat meminimalkan potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan teori Agency, yang menekankan bahwa pengawasan internal berfungsi sebagai kontrol untuk menjamin bahwa laporan keuangan sesuai dengan kepentingan publik dan ketentuan yang berlaku (Al-Faryan, 2024).

Studi Kaawaase et al., (2021), mengonfirmasi bahwa pengawasan internal yang kuat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan memastikan bahwa semua langkah dalam proses penyusunan laporan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks pemerintah daerah, pengawasan internal yang lemah dapat berpotensi menciptakan laporan keuangan yang tidak andal dan kurang transparan. Eltrudis et al., (2024), menambahkan bahwa pengawasan internal yang berbasis aplikasi dan audit triwulanan dapat meningkatkan ketepatan waktu dan ketaatan terhadap regulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah yang

telah mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis aplikasi mengalami peningkatan kualitas laporan keuangan yang signifikan.

4. Pengaruh Simultan Implementasi SIKD, Kompetensi SDM, dan Pengawasan Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa ketiga variabel—SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal—secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa kualitas laporan keuangan tidak dapat dilihat sebagai hasil dari satu faktor tunggal, melainkan sebagai produk dari interaksi antara berbagai elemen sistem, manusia, dan kontrol. Hal ini mendukung perspektif sistem yang menjelaskan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan keuangan publik bergantung pada koordinasi yang efektif antara SIKD, SDM, dan pengawasan internal.

Dalam hal ini, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur yang ada, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia. Studi oleh Liu et al., (2025), menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan digital yang didukung oleh kompetensi SDM dan pengawasan internal yang kuat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif dalam manajemen keuangan publik, di mana teknologi, kapasitas manusia, dan pengawasan berjalan secara bersamaan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi peran penting dari implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan pengawasan internal dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut saling melengkapi dan memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, baik secara individu maupun secara bersama-sama.

Implementasi SIKD sebagai alat bantu digital dalam pengelolaan keuangan terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam pengoperasian SIKD, terutama yang terkait dengan kendala teknis dan kurangnya pelatihan bagi pengguna di lapangan.

Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan penerapan SIKD tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga pada kemampuan SDM untuk mengoperasikannya dengan baik.

Kompetensi SDM terbukti memberikan dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pegawai yang memiliki keterampilan teknis akuntansi dan pemahaman yang memadai terhadap regulasi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk mendukung efektivitas penerapan SIKD dan pengawasan internal.

Pengawasan internal memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan integritas dan akurasi laporan keuangan. Pengawasan yang efektif dapat mendeteksi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan. Penggunaan teknologi dalam pengawasan internal—seperti aplikasi pengendalian dan audit berbasis risiko—dapat memperkuat kualitas laporan keuangan, sebagaimana yang terlihat pada daerah-daerah yang telah mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis aplikasi.

Secara keseluruhan, ketiga faktor ini—SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal—berperan saling mendukung dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan publik, di mana teknologi, kapasitas manusia, dan pengawasan dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan bagaimana strategi implementasi yang lebih baik dapat diterapkan untuk meningkatkan tata kelola keuangan publik di tingkat daerah.

SARAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di

Provinsi Jawa Timur, dan pada umumnya di Indonesia, adalah sebagai berikut.

Pertama, penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Meskipun SIKD telah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, tantangan teknis dan kurangnya pelatihan yang memadai masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah menyediakan pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) terkait pengoperasian SIKD. Selain itu, dukungan teknis yang lebih kuat, baik dari pihak pengembang sistem maupun dari manajemen internal daerah, perlu diperkuat agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal.

Kedua, pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang akuntansi sektor publik harus menjadi prioritas dalam reformasi keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Untuk itu, selain pelatihan teknis terkait penggunaan SIKD, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan memiliki pemahaman yang mendalam tentang regulasi akuntansi pemerintah. Sertifikasi akuntansi sektor publik dan pelatihan berbasis standar akuntansi pemerintahan (SAP) juga harus menjadi bagian dari program peningkatan kapasitas SDM.

Ketiga, pengawasan internal yang efektif dan terstruktur perlu diperkuat untuk mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan. Pengawasan internal harus tidak hanya berfungsi sebagai kontrol administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah potensi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas auditor internal dan memperkenalkan sistem pengawasan berbasis aplikasi yang dapat meningkatkan ketepatan waktu dan ketaatan terhadap regulasi. Selain itu, sistem pengendalian berbasis risiko dapat diterapkan untuk memastikan pengawasan terfokus pada area yang paling rentan terhadap penyimpangan.

Keempat, untuk mencapai tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, disarankan agar pemerintah daerah mengintegrasikan ketiga elemen utama—SIKD, kompetensi SDM, dan pengawasan internal—secara lebih harmonis dalam setiap langkah perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah. Kolaborasi

antara pengelola sistem, pegawai yang kompeten, dan pengawas internal yang efektif akan menciptakan ekosistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Terakhir, diperlukan adanya penelitian lanjutan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah, seperti budaya organisasi dan faktor eksternal seperti regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat. Penelitian tersebut dapat memberikan wawasan tambahan yang berguna untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan terintegrasi, diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan, memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai tujuan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia.

REFERENSI

- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in Sou. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 811–818.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>
- Al-Faryan, M. A. S. (2024). Agency theory, corporate governance and corruption: an integrative literature review approach. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2337893.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2337893>
- Barney. (1991). Firm resources and sustained Competitive Advantage. . . *Journal of Management*, 17(1): 99–120.
- Bekiaris, M., Markogiannopoulou, A., Paraponti, T., & Spanou, F. (2025). Digital innovations for public sector accounting reforms: comparative insights from collaborative efforts. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-09-2024-0181>
- Camisón-Haba, S., Clemente-Almendros, J. A., & Gonzalez-Cruz, T. (2024). Connecting Human and Information Resources in the Generation of Competitive Advantage. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(4), 19262–19293.
<https://doi.org/10.1007/s13132-024-01907-y>
- Davis. (1986). A Technology acceptance model for empirically testing new-end user information systems: Theory and Result. . . *Unpublished Ph.D. Dissertation, Sloan: Sloan School of Management, Massachusetts Institutur of Technology (MIT)*.
- Eltrudis, D., Monfardini, P., & Pattaro, A. F. (2024). Public auditors' perception of digital platforms for popular reporting: insights from the case study of OpenBDAP. *International Journal of Public Sector Management*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2024-0012>

- Gazali, Z. and. (2023a). Pengaruh Digitalisasi Rantai Pasokan Dan Rantai Pasokan Hijau Terhadap Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Pamekasan. *Public Corner: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 18(2), 69–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/fisip.v18i2.2973>
- Gazali, Z. and. (2023b). Supply Chain Digitalization, Green Supply Chain, Supply Chain Re-silience Toward Competitiveness and MSMEs Performance. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 22(1), 175–192. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21776/ub.jam.2024.022.01.14>
- Hair. (2014). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM): An Emerging Tool in Business Research. . . *European Business Review*, 26(2): 106-121.
- Kaawaase, T. K., Nairuba, C., Akankunda, B., & Bananuka, J. (2021). Corporate governance, internal audit quality and financial reporting quality of financial institutions. *Asian Journal of Accounting Research*, 6(3), 348–366. <https://doi.org/10.1108/AJAR-11-2020-0117>
- Karatzimas, S., Heiling, J., Adam, B., Brunelli, S., Falivena, C., Jorge, S., Greiling, D., Dragija Kostić, M., & Narbón-Perpiñá, I. (2025). The coverage of public sector financial management in MPA and MPM programs: evidence from Europe. *International Journal of Public Sector Management, ahead-of-print*(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJPSM-03-2024-0083>
- Klaus, J. P., Masli, A., & Sapkota, P. (2025). Access to IT-Capable employees and the relevance of financial information. *Journal of Accounting and Public Policy*, 51, 107284. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2025.107284>
- Kombat, B., Yaw, A., & and Twum, P. (2025). Evaluating the impacts of information technology for the development of internal control systems in the judicial service. *Technology Analysis & Strategic Management*, 1–14. <https://doi.org/10.1080/09537325.2025.2509242>
- Liu, Y., Liu, Q., & Wei, Y. (2025). Digital finance, internal control, and audit quality. *Finance Research Letters*, 76, 107033. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.frl.2025.107033>
- Mankevich, Vasili, Magnusson, Johan, & Svahn, Fredrik. (2023). The great wave: The increasing demand for digital competence within the public sector. *Information Polity*, 28(3), 411–434. <https://doi.org/10.3233/IP-220012>
- Matheus, R., Faber, R., Ismagilova, E., & Janssen, M. (2023). Digital transparency and the usefulness for open government. *International Journal of Information Management*, 73, 102690. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102690>
- Maulidiyah, D. N., & Harto, P. (2025). The role of social control in deterring corporate financial statement fraud. *Discover Global Society*, 3(1), 20. <https://doi.org/10.1007/s44282-025-00155-y>
- Mbae, B. B., Dick-Sago, C., Odoom, D., & Adams, I. (2025). Digital Transformation and E-Service Delivery in African Public Sector Organisations: Insights into Botswana’s Ministry of Agriculture. *Digital Society*, 4(2), 37. <https://doi.org/10.1007/s44206-025-00186-7>
- Mora, L., Gerli, P., Ardito, L., & Messeni Petruzzelli, A. (2023). Smart city governance from an innovation management perspective: Theoretical framing, review of current practices, and future research agenda. *Technovation*, 123, 102717. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.technovation.2023.102717>
- Nakpodia, F., Sakariyahu, R., Fagbemi, T., Adigun, R., & Dosumu, O. (2024).

- Sustainable development goals, accounting practices and public financial management: A pre and post COVID-19 assessment. *The British Accounting Review*, 101466. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bar.2024.101466>
- Ngoc Hung, D., Vu Thi, T. Van, & Archer, L. (2023). Factors affecting the quality of financial statements from an audit point of view: A machine learning approach. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2184225. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2184225>
- Nguyen, T., Chen, J. V., & Nguyen, T. P. H. (2021). Appropriation of accounting information system use under the new IFRS: Impacts on accounting process performance. *Information & Management*, 58(8), 103534. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.im.2021.103534>
- Novatiani, R. A., R. Wedi Rusmawan, K., Winwin, Y., Radhi, A. H. R., & Arifian Rachman, A. (2024). Internal auditor competence and internal control: Improving internal audit quality to prevent fraudulent financial statements. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2409339. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2409339>
- Pauluzzo, R., Fedele, P., Dokalskaya, I., & Garlatti, A. (2024). The role of digital technologies in public sector coproduction and co-creation: A structured literature review. *Financial Accountability & Management*, 40(4), 613–640. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/faam.12391>
- Pham, Q. T., Thi Hanh Dung, T., Xuan Thuy, H., & Nguyen, Q. T. (2022). The role of supervisory mechanisms in improving financial reporting quality by Vietnam public non-business unit. *Cogent Business & Management*, 9(1), 2112538. <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2112538>
- Rahmani, Ali, Behbahaninia, Parisa Saadat, Parsaei, Mona, & Mahmoudkhani, Mahnaz. (2023). A public sector financial management maturity model for developing countries: the case of Iran. *International Review of Administrative Sciences*, 90(3), 581–598. <https://doi.org/10.1177/00208523231195707>
- Roberto, F., Grossi, G., Guthrie, J., & Mattei, G. (2025). The development of New Public Financial Management scholarship: from global warning to emerging warnings. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 37(6), 49–76. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-01-2025-0021>
- Roztock, N., Wojciech, S., & Weistroffer, H. R. (2025). Enterprise Systems in the Public Sector: Current Research Landscape. *Information Systems Management*, 42(2), 161–188. <https://doi.org/10.1080/10580530.2024.2361617>
- Suttipun, M., Sattayarak, O., Duangpanya, P., & Runglertkengkrai, S. (2018). Relationship between competency as per the international education standards for accounting professionals and the awareness and understanding of the Thai financial reporting standards for small and medium sized enterprises: A case study of accounting prof. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 39(3), 432–438. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.kjss.2018.06.013>
- Tarjo, T., Henryan Vishnu, V., Alexander, A., Rita, Y., & Musyarofah, S. (2022). The effect of enterprise risk management on prevention and detection fraud in Indonesia's local government. *Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2101222. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2101222>
- Tejedo-Romero, F., & Ferraz Esteves Araujo, J. F. (2025). The influence of organizational resources and administrative processes on the quality of Brazilian open data. *Information Technology for Development*, 1–38. <https://doi.org/10.1080/02681102.2025.2484616>

- Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam. *Journal of Accounting and Public Policy*, 40(1), 106801.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801>
- Usman, R., Abdul, R., & Ratmono, D. (2023). The relationship of internal auditors' characteristics with external auditors' reliance and its impact on audit efficiency: Empirical evidence from Indonesian government institutions. *Cogent Business & Management*, 10(1), 2191781. <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2191781>
- Virginia Deskarani, & Vivi Oktari. (2024). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Di Inspektorat Kota Sabang. *Indonesian Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(12 SE-Articles), 1439–1448.
<https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/971>
- Wang, X., Wang, N., Sun, W., Xu, A., & Zhang, Z. (2024). Digital transformation and enterprise violation risk: A 'motivation-opportunity-attitude' framework. *Heliyon*, 10(20), e39125. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e39125>
- Yamen, A., & Can, G. (2023). The impact of public governance perception on the quality of financial reporting. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(3), 2223264. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2023.2223264>
- Zainurrafiqi, Gazali, Zef Risal, Rachman Hakim, Rusdiyanto, N. F. A. (2024). Organizational Resilience, Strategic Foresight, and Green Supply Chain Integration: A Pathway to Sustainable Performance in MSMEs Through Green Competitive Advantage. *Journal of Management World*, 4(856–866).
<https://doi.org/https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.552>
- Zainurrafiqi, Ria Racawati, Devi Lestari Pramita Putri, Enza Resdiana, Endang Widyastuti, Qaiyim Asy'ari, Rusdiyanto, W. H. (2020). The Determinants And Consequents Of Competitive Advantage Based Of Local Wisdom At The Micro, Small, And Medium Enterprise : Evidence From Indonesia. *Solid State Technology*, 63(6), 1604–1620.
<http://solidstatetechnology.us/index.php/JSST/article/view/2260>
- Zainurrafiqi, Z., & Rachmawati, R. (2019). Pengaruh Etika Bisnis, Faktor Kontingensi Dan Tingkat Penggunaan Internet Terhadap Daya Saing. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 2(4), 550–571.
<https://doi.org/https://ejournal.stiesia.ac.id/ekuitas/article/view/426/446>
- Zhuang, X., & Duan, L. (2025). Can local financial regulation improve corporate investment efficiency? Evidence from China. *Accounting Research Journal*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/ARJ-06-2024-0221>